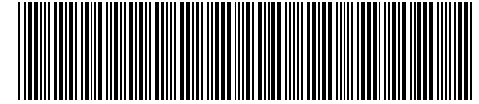




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.03.2.408902/2024**



DS:0824-0013-5303-7123

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 3. Provinsi : (25) PAPUA
 4. Kode>Nama Satker : (408902) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
- Sebesar : Rp. 2.045.065.000 (DUA MILIAR EMPAT PULUH LIMA JUTA ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.03.BF.5251 Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	2.045.065.000
Rp.	2.045.065.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.045.065.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 2.045.065.000

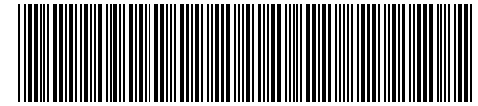
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0824-0013-5303-7123

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408902) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

Halaman : I A. 1

Program	: 013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.045.065.000
Kegiatan	: 5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.045.065.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
	: 2. 01	Persentase peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah			
	: 3. 01	Persentase permohonan Layanan BHP yang diselesaikan			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	4,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	1.200.789.000
Rincian Output	: 01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan	1.200.789.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara, Berkas Perkara	45.604.000
Rincian Output	: 01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,00	Perkara	45.604.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	798.672.000
Rincian Output	: 01 BIC.001	Pengawasan kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	3,00	Lembaga	798.672.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

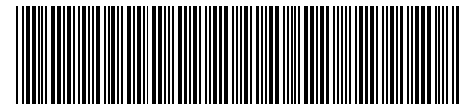
ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2024

I B. SUMBER DANA



DS:0824-0013-5303-7123

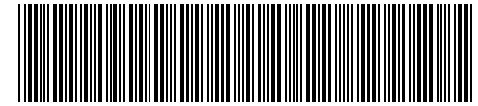
Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
 Provinsi : (25) PAPUA
 Kode>Nama Satker : (408902) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	2.045.065.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	2.045.065.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0824-0013-5303-7123

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408902) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA
Kewenangan : (KD)

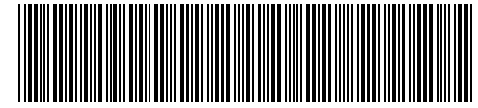
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408902	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	-	2.045.065	-	-	-	2.045.065		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.045.065	-	-	-	2.045.065		
5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.045.065	-	-	-	2.045.065		
5251.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	1.200.789	-	-	-	1.200.789	25 . 51	
04	PNBP	-	1.200.789	-	-	-	1.200.789	063	
5251.BCB	Perkara Hukum Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	45.604	-	-	-	45.604	25 . 51	
04	PNBP	-	45.604	-	-	-	45.604	063	
5251.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	798.672	-	-	-	798.672	25 . 51	
04	PNBP	-	798.672	-	-	-	798.672	063	
JUMLAH		-	2.045.065	-	-	-	2.045.065		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0824-0013-5303-7123

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (03) Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (408902) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

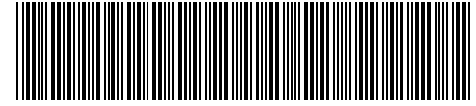
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408902	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	171.072	2.045.065
		BELANJA BARANG	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	171.072	2.045.065
	013.03.BF.5251	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	171.072	2.045.065
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	170.363	171.072	2.045.065

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2024
IV A. B L O K I R**



DS:0824-0013-5303-7123

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [408902] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

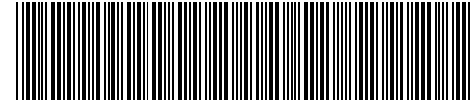
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.03.2.408902/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:0824-0013-5303-7123

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [03] Ditjen Administrasi Hukum Umum
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [408902] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
NIP 196909181994031001